1. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Benar

Salah

Jawaban Soal : SALAH

Seharusnya :

Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pasal 1 angka 16Pasal 1 angka 16

2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah lembaga yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Benar

Salah

Jawaban seharusnya : SALAH
Yang seharusnya :
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Pasal 1 angka 24

3. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

Benar

Salah

Jawab : Benar

Pasal 4 huruf a

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

4. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang semakin dapat dipertanggungjawabkan, transparan, terbuka, atau kompetitif

Benar
Salah

Jawab : Salah

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

Jawab :

Pasal 5 huruf b

5. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya/HPS merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan Swakelola.

Benar
Salah

Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan Swakelola.
Modul 3
Jawab:
SALAH
Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya merupakan tugas tim persiapan dalam penyelenggaraan Swakelola.
Referensi: Pasal 16 ayat 2
Modul 3 atau PerLKPP tentang Swakelola

6. Salah satu tugas PPK dalam PBJ diantaranya melaksanakan Konsolidasi PBJ, menetapkan Pelaku Usaha menjadi Penyedia melalui Tender/Seleksi, dan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : SALAH
Salah satu tugas PPK dalam PBJ diantaranya melaksanakan Konsolidasi PBJ, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan lain lain yang ada dalam pasal 11 ayat (1) perpres 12/2021

7. Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk paket pengadaan barang senilai Rp 145 Miliar.
Benar/Salah

Jawaban yang tepat : BENAR

Pasal 9 huruf n Perpres PBJP :

PA menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah);

8 Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak hanya dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, dan tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui

pengadilan.
Benar/Salah

Jawaban yang tepat : SALAH
Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, dan penyelesaian melalui pengadilan.

Modul 4 Referensi: Pasal 85 ayat 1

9. Dalam proses katalog perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi

berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun

Jawaban yang tepat : Salah
Dalam proses katalog hal diatas digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun
Referensi: Pasal 80 ayat 4a

10. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ, digitalisasi keuangan, dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi

pengguna seluruh sistem informasi PBJ, dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

Jawaban yang tepat : SALAH
Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi

pengguna seluruh sistem informasi PBJ, dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

Referensi: Pasal 73 ayat 2

11. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK tidak dimungkinkan penyebutan merk terhadap komponen barang/jasa

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : SALAH
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap komponen barang/jasa
Modul 5. Perencanaan PBJP
Referensi : Pasal 19 ayat 2 Perpres12 21
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/ KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:
a. Komponen barang/ jasa;

b. Suku cadang;
c. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada; atau
d. Barang/ jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

12. Konsolidasi dan pemaketan pengadaan barang/jasa merupakan perencanaan melalui penyedia, konsolidasi tidak dilakukan pada cara Swakelola

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : Benar

Modul 5: Perencanaan PBJP

Perencanaan PBJ melalui Swakelola terdiri dari:

- Penetapan Tipe Swakelola
- Penyusunan Spek/KAK
- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya/RAB

Pasal 18

13. Pengumuman Tahap Pemilihan Penyedia dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : SALAH

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Modul 5 : Perencanaan PBJP

Referensi : Pasal 22 ayat 3 Perpres 16 18

14. Ketentuan kontrak tahun jamak yaitu pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : Benar

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

15. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, besar jaminan pelaksanaan ialah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri

Jawaban yang tepat : SALAH

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, besar jaminan pelaksanaan ialah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran

Modul 6

Referensi: pasal 33 ayat 4

16. Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : Benar
Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga
Pasal 39 ayat (2) Perpres PBJ

17. Penyelenggara Swakelola dapat berasal dari Kementerian / Lembaga/Perangkat Daerah lain

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : Benar
Lihat Swakelola Tipe II

18. Tim Pelaksana bertugas melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala

Benar/Salah

Jawab :

BENAR

Tim Pelaksana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) bertugas melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala

19. Pada pelaksanaan Swakelola tipe II, PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : Benar

Modul 7

Jawaban:

Pada pelaksanaan Swakelola tipe II, PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

Pasal 47 ayat 2

20. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 3 (tiga) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan atau jika jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung

Jawaban yang tepat : Salah

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan atau jika jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta,

dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung

Modul 8
Referensi: pasal 51 ayat 6

21. Pelaksanaan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai

Benar/Salah

Jawaban yang tepat :
BENAR
Pelaksanaan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai
Referensi: pasal 50 ayat 3

22. Penawaran harga dalam proses pemilihan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilakukan metode penawaran harga /pemasukan harga secara berulang (E-Reverse auction) kecuali diatur lain dalam Peraturan teknis terkait.

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : SALAH
Penawaran harga dapat dilakukan,dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Modul 8
Referensi: pasal 50 ayat 11

23. Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 25 Miliar Rupiah.

Benar/Salah

Jawaban yang tepat : BENAR
Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 25 Miliar Rupiah.
Pasal 63 ayat 1

24. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi yang diekspor dari dalam negeri.

Benar/Salah

Jawaban yang tepat SALAH :
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Pasal 65 ayat 2

25. Katalog elektronik adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Benar/Salah

Jawaban yang tepat SALAH
Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
Pasal 72 ayat 1

PILIHAN GANDA

26. Agen Pengadaan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan dapat melaksanakan tugas :

a. Kelompok Kerja Pemilihan

b. Pejabat Pembuat Komitmen

c. Mutatis Mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

d. Jawaban A, B, dan C benar

Jawab : d

Bagian Ketujuh
Agen Pengadaan

Pasal 14

Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

27. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp 100 juta dilakukan dengan metode pemilihan

a. Seleksi

b. Seleksi Khusus

c. Penunjukan Langsung

d. Pengadaan Langsung

Jawaban yang tepat a.

Pasal 41

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi;
b. Pengadaan Langsung; dan
c. Penunjukan Langsung.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

28. Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit Rp 200 juta dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan

a. Seleksi

b. Tender

c. Penunjukan Langsung

d. Pengadaan Langsung

Jawaban b
Pasal 38 Perpres PBJ AYAT (1) dan Ayat (7)

Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

29. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah :

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

b. menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD

c. menggunakan anggaran Pinjaman/Hibah dari Dalam dan Luar Negeri

d. Semua jawaban a, b, dan c benar

Jawaban yang tepat d

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

30. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan tidak dapat diikuti oleh pelaku usaha asing adalah pada metode :

a. Tender Internasional

b. Seleksi Khusus

c. Seleksi Internasional

d. Pengadaan Langsung

D. Pengadaan Langsung
Pasal 1 angka 38, Pasal 63 dan Pasal 65

38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

Bagian Kelima

Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 63

(1) Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

BAB IX

USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 65

(4) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan / atau koperasi.

31. Metode Pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pemenuhan kriteria khusus, salah satu kriteria khusus tersebut adalah untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

a. Seleksi

b. Tender

c. Penunjukan Langsung

d. Pengadaan Langsung

Jawaban
Penunjukan Langsung
Pasal 38 ayat (5)

32. Salah satu Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

a. Mengembangkan e-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa
b. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan
c. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
d. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat

Jawab

c. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

Pasal 4 huruf e

33. Pengertian dari prinsip efektif pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

A Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

B Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

C Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

D Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat

Jawab :

B. Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Prinsip Pengadaan ada pada Pasal 6 Penjelasan dapat melihat pada modul 2 PBJ Tk. Dasar, Halaman 32

34. Memberikan informasi yang jelas dengan semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, merupakan pengertian dari prinsip :

a. Terbuka

b. Transparan

c. Adil

d. Akuntabel

Jawaban pada Modul 2 halaman 33
Transparan

35. Sikap yang bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu sikap dari :

a. Etika Pengadaan
b. Kebijakan Pengadaan
c. Tujuan Pengadaan
d. Prinsip Pengadaan

Jawab :

a. Etika Pengadaan

Lihat pasal 7 ayat (1) huruf b

36.Perhatikan pernyataan berikut!

1) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

2) Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditingkatkan

3) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

4) Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

5) Mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk Kebijakan PBJ…

A. 1, 4, dan 5

B. 1, 3, dan 5

C. 2, 4, dan 5

D. 2 dan 3

Jawab D
Lihat pasal 5

37. Perhatikan Pernyataan berikut :

1) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

2) Kepatuhan terhadap peraturan

3) Kepatuhan terhadap penyedia

4) Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

5) Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk tujuan PBJ…

A. 1, 2, dan 5
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 2, 4, dan 5
D. 1, 4 dan 5

Jawab

d. 1, 4, 5

38. melaksanakan proses pemilihan penyedia, merupakan tugas dari :

a. Pengguna Anggaran

b. Kuasa Pengguna Anggaran

c. Pejabat Pembuat Komitmen

d. Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ

Jawab :

d. Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ
Lihat Pasal 13

39. Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugas Pelimpahan dari PA, termasuk melakukan kewenangan :

a. Menjawab Sanggah Banding pada Pekerjaan Konstruksi

b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

c. Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia

d. Melaksanakan Kontrak dan bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa

a

Referensi Pasal 10

40.Tugas Tim Persiapan Swakelola diantaranya

A. Menyusun spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak

B. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola

C. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

D. Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

Jawab :

Pasal 16 ayat (2)

C. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

41. Salah satu tugas Agen Pengadaan yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas adalah :

A. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar
B. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 10 miliar
C. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar
D. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 100 miliar

C. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar

Jaawaban ada pada
Modul 3
Referensi: Pasal 13 ayat 1 jo. Pasal 14 ayat (2)

42. Pada Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah, yang berwenang menjawab sanggah tersebut adalah …

A. APH

B. APIP

C. KPA

D. Pokja Pemilihan

Jawab :

D. Pokja Pemilihan

Perhatikan Pasal 13

43. Pelaksanaan Kontrak yang dilakukan secara kolaboratif dengan keseluruhan kegiatan yang dimulai dari menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya, dilanjutkan dengan tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, kemudian disertai dengan tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi, merupakan tanggung-jawab :

a. PPK
b. PA/KPA
c. Penyelenggara Swakelola
d. Penyedia

c. Penyelenggara Swakelola

Referensi :

Modul 3

Pasal 16

44. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam Pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui, Kecuali :

a. Layanan Penyelesaian Sengketa Konsultansi

b. Dewan Sengketa Konstruksi

c. Pengadilan

d. Arbitrase

Jawab :

a.

Kecuali Layanan penyelesaian Sengketa Konsultansi

Pasal 85 ayat (1)

45. Salah satu Fungsi UKPBJ adalah :

a. Penyelenggaraan dukungan pengadaan barang pada Kementerian

b. Penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian

c. Penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa pada Lembaga

d. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Jawab :

d. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Lihat Pasal 75 ayat (2)

46. salah satu penyedia barang tidak melaksanakan kewajiban dalam surat pesanan, maka dikenakan sanksi :

A. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

B. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam

C. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

D. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E- purchasing selama 6 (enam)bulan

Jawab :
D. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E- purchasing selama 6 (enam)bulan

Lihat di Pasal 80

47. Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah….

A. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik

B. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik

C. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik

D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik

Jawab :

D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik

Modul 4

Referensi: Pasal 71 ayat 1

48. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
2) Kepatuhan terhadap peraturan;
3) Kepatuhan terhadap penyedia;
4) Pencapaian TKDN;
5) Penggunaan produk luar negeri;
6) Penggunaan produk dalam negeri;
7) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha besar;
8) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil ;
9) Pengadaan berkelanjutan.
Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk ruang lingkup pengawasan PBJ… Pilih salah satu:
a. 1, 2, 5, 6, 7, dan 9
b. 1, 2, 4, 6, 8, dan 9
c. 1, 2, 3, 5, 7, dan 9
d. 1, 2, 3, 4, 5, dan 9

Jawab :

B

Jawaban yang tepat adalah: 1, 2, 4, 6, 8, dan 9

49. Kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kelalaian dari Penyedia, maka sanksi yang diberikan berupa… Pilih salah satu:

a. sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan

b. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam

c. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

d. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

Jawab :

A

Jawaban yang tepat adalah: sanksi ganti kerugian sebesar

nilai kerugian yang ditimbulkan

50. Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Pemerintah Daerah, PPK dapat dibantu oleh… Pilih salah satu:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah

c. Penyedia

d. Aparat Penegak Hukum

Jawaban yang tepat adalah: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

A

51. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu…. Pilih salah satu:

a. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli

b. PA/KPA dan PPK

c. PA/KPA dan Pejabat Pengadaan

d. PPK dan Pokja pemilihan

B

Jawaban yang tepat adalah: PA/KPA dan PPK

52. Spesifikasi adalah karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis. Dalam menyusun spesifikasi teknis TIDAK disarankan untuk, KECUALI Pilih salah satu:

a. menggunakan produk bekas

b. menggunakan produk dalam negeri

c. menggunakan produk diskontinu

d. menggunakan produk berwarna hijau

Jawaban yang tepat adalah: menggunakan produk dalam negeri

B

53. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja(KAK) barang/jasa dimungkinkan penyebutan merek terhadap.. Pilih salah satu:

a. Komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang telah ada atau barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring

b. Komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang telah ada atau barang/jasa di pasar konvensional

c. Unit utama, komponen, suku cadang atau barang/jasa di pasar konvensional

d. Unit utama, komponen, suku cadang atau barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring

Jawaban yang tepat adalah: A. Komponen, suku cadang, bagian
dari satu sistem yang telah ada atau barang/jasa dalam
katalog elektronik atau toko daring

54. Perencanaan Pengadaan ditetapkan oleh PA dan diumumkan di RUP oleh PA, yang bertugas Menyusun Perencanaan Pengadaan adalah :

a. PPK

b. Kelompok Kerja Pemilihan

c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

d. Pejabat Pengadaan

Jawab :

a. PPK

55. Pemaketan jasa konsultansi non-konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dialokasikan hanya untuk jasa konsultansi non-konstruksi dengan kualifikasi…

Pilih salah satu:

a. Usaha Menengah

b. Usaha Kecil

c. Usaha Non-Kecil

d. Tidak diatur

Jawaban yang tepat adalah:
Tidak diatur
Lihat Pasal 65

56. Berikut ini Penyelenggara Swakelola yang dalam bertugas adalah benar dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah, KECUALI :

a. Tim Pelaksana

b. Tim Perencanaan

c. Tim Pengawas

d. Tim Persiapan

Jawab :

b. Tim Perencanaan

Tidak ada Tim Perencanaan dalam Penyelenggara Swakelola

Seluruh tim, baik Tim Persiapan, Tim Pelaksana, maupun Tim Pengawas dapat dibantu oleh JF PPBJ sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5), adapun menurut Pasal 16 ayat (1) Tim dalam Penyelenggara

Swakelola HANYA Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan atau Tim Pengawas.

57. Penetapan tim persiapan dan tim pengawas swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Sadar Wisata dilakukan oleh :

a. Pimpinan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata

b. PPK

c. Kelompok Kerja Pemilihan

d. PA/KPA

Jawaban :

a. Pimpinan Pokdarwis

Pasal 23 ayat (3) huruf d

Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:

Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

58. Penetapan Nota Kesepahaman /Memorandum of Undetstanding (MOU) sebagai Kesepakatan Kerjasama Swakelola Tipe II yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah Kab. X dengan Universitas Negeri Kab. X dilakukan oleh :

a. Bupati Kab. X dengan Pimpinan Universitas Negeri Kab. X

b. Bupati Kab. X dengan Rektor Universitas Negeri Kab. X

c. PPK dengan Pimpinan Universitas Negeri Kab. X

d. PA dengan Pimpinan Univ Negeri Kab. X

Jawab :

D. PA dengan Pimpinan Univ Negeri Kab. X

Ketentuan terkait Nota Kesepahaman / Kesepakatan Kerja Sama Swakelola Tipe II diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Perpres PBJ :

Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

59. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa mampu dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Dinas X selaku Penanggung Jawab Anggaran, maka pelaksanaan nya dapat dilakukan melalui Swakelola :

a. Tipe I

b. Tipe II

c. Tipe III

d. Tipe IV

Jawaban yang tepat adalah Tipe I

60. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola yang dilakukan sendiri oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dapat menggunakan tenaga ahli sebanyak...

a. Tidak lebih dari 50% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan ini

b. Tidak dibatasi dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan

c. Tidak lebih dari 60% - 70% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan ini.

d. Tidak lebih dari 50% jumlah anggota tim pelaksana yang terlibat dalam pekerjaan ini.

Jawaban yang tepat :

d.

Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5)

(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

61. Dinas X memiliki anggaran kegiatan penanaman kembali daerah aliran sungai yang kontraknya dilaksanakan oleh Kelompok Tani daerah sepanjang sungai. Untuk tiap pucuk bibit tanaman yang dapat tumbuh dihargai Rp10.000, Cara Pengadaan yang digunakan yang tepat adalah :

a. Penyedia
b. Swakelola Tipe II
c. Swakelola Tipe III
d. Swakelola Tipe IV

Jawaban :
Swakelola Tipe IV

62. Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan :

a. Pengadaan Makan Minum Rapat senilai Rp10 juta

b. Pembelian laptop melalui e-Purchasing

c. Pengadaan Kertas senilai Rp50juta

d. Tender Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun

Jawaban :

C. Pengadaan Kertas senilai Rp 50 juta

63. Metode Pemilihan Penyedia untuk pengadaan barang yang akan dibagikan kepada Petani berupa Bibit Cabe dengan nilai Paket Rp12 Milyar dan Pupuk Urea dengan nilai Rp10 Milyar adalah :

a. Paket Pengadaan Benih Cabe dan Pupuk Urea dengan nilai Rp 22Milyar dengan Tender Cepat
b. Paket Pengadaan Benih Cabe dan Pupuk Urea dengan nilai Rp 22Milyar dengan Tender Prakualifikasi
c. Paket Pengadaan Benih Cabe Rp12 Milyar dengan Tender dan Pupuk Urea dengan nilai Rp 10Milyar dengan Pengadaan Langsung
d. Paket Pengadaan Benih Cabe Rp12 Milyar dengan Tender dan Pupuk Urea dengan nilai Rp 10Milyar dengan Penunjukan Langsung

Jawab :
Pasal 38 ayat (5) huruf e
pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat
untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

Jawaban yang tepat D

Paket Pengadaan Benih Cabe Rp12 Milyar dengan Tender dan Pupuk Urea dengan nilai Rp 10Milyar dengan Penunjukan Langsung

64. Anda bekerja di Sekretariat Dinas X Kota ABC, untuk Pengadaan Makan Minum Rapat anda memanfaatkan Toko Daring dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara Pemanfaatan Toko Daring ialah …..

Pilih salah satu :

a. Melalui e-Purchasing
b. Melalui e-Marketplace
c. Melalui e-Green Product
d. Melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia

Jawab :

pASAL 38 AYAT (2)

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

JAWABAN A

65. Metode Kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan adalah :

Pilih salah satu :

a. Kualitas
b. Sistem Gugur
c. Pembobotan Ambang Batas
d. Pascakualifikasi

Jawaban :
Pasal 44
(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan
sebagai berikut:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
b. SeleksiJasaKonsultansiPerorangan.

Maka :

d. Pascakualifikasi

66.Metode Penilaian khusus untuk Pengadaan Non-Konsultansi selain Pengadaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang digunakan untuk menilai penawaran Penyedia Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu penggunaan tertentu adalah :

a. Sistem Nilai

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

c. Kualitas

d. Kualitas dan Biaya

Jawaban :

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3)

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

67. Jenis Pekerjaan dengan harga satuan dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 pada kontrak dengan :

a. Pelaksanaan Pekerjaan pada kontrak tahun jamak;

b. Pelaksanaan Pekerjaan pada semua kontrak lumsum;

c. Pelaksanaan Pekerjaan pada kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan 18 bulan;

d. Pelaksanaan Pekerjaan pada kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 18 bulan

Jawaban :
Lihat Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b
Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
Jawaban D

68. Pemberlakuan indeks penyesuaian harga dalam hal kontrak dilaksanakan terlambat disebabkan kesalahan oleh penyedia adalah menggunakan :

a. indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

b. indeks yang berlaku pada saat penyesuaian dilakukan

c. indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan

d. indeks rata-rata antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan

Jawab :

C indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan

SESUAI DENGAN Pasal 37 ayat (2) huruf g

69. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang merupakan suatu
perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju
untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk
pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap
dioperasikan atau dihuni disebut.....

A Putar Kunci

B Biaya Plus Imbalan

C Harga Terendah

D Pagu Anggaran

Jawaban :

A. Putar Kunci

Modul 6

Referensi: Pasal 27 ayat 2

70. Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, maka metode evaluasi penawaran yang paling tepat untuk pengadaan catering dilakukan dengan metode....

A Sistem Nilai

B Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

C Harga Terendah

D Pagu Anggaran

Jawab c. Harga Terendah

Pasal 39 ayat (4)

71. Apabila dalam Tender/Seleksi ulang ternyata diketahui bahwa terdapat Tindakan persekongkolan yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal oleh ……

A. Pengguna Anggaran
B. Pejabat Pembuat Komitmen
C. Pokja Pemilihan
D. Aparat Penegak Hukum

Jawaban :

A. Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) :
Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
i dinyatakan oleh PA/KPA.

Pasal 51 ayat (2) huruf I berbunyi :
Tender/Seleksi gagal dalam hal:

i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

72. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi....

A 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS

B 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS

C 10 % dari harga yang tercantum dalam kontrak akhir

D 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal

Jawab :

D 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal

Modul 8

Referensi: Pasal 54 ayat 2

73. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak...

A Pelaksanaan pekerjaan

B Pengumuman pemenang

C Penerbitan SPPBJ

D Penandatangan adendum kontrak

Modul 6
D Penandatangan adendum kontrak

Referensi: Pasal 37 ayat 2f

74. Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender Cepat ulang mengalami kegagalan karena korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, maka Tender Cepat ditindaklanjuti oleh ……

A. Pengguna Anggaran
B. Pejabat Pembuat Komitmen
C. Pokja Pemilihan
D. Aparat Penegak Hukum

Jawab :

Pasal 51 ayat (11) : Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

Namun dalam hal pelanggaran non-etis pada KKN ini, pada prinsipnya Pengguna Anggaran dapat melaksanakan tugasnya sehingga yang lebih tepat adalah A. Pengguna Anggaran

75. Salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah....

A Pelaksanaan Pemilihan Penyedia tidak dapat diberhentikan

B Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat melakukan perubahan kontrak

C Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak tidak dapat melewati tahun anggaran

D Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak

Jawab :
D. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak

Sesuai Pasal 55 :
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan
keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam
Kontrak.

76. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan :

a. Perpanjangan Waktu untuk penyelesaian Kontrak yang dapat melewati Tahun Anggaran

b. PPK melakukan penunjukan langsung pada Pemenang Cadangan

c. PPK melakukan Pemutusan Kontrak karena Kegagalan Penyedia

d. PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan

Jawab :
d. d. PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan

Sesuai Pasal 56 ayat (1) : Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan

kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

77. PPK menyerahkan barang/jasa yang telah selesai 100% kepada :

a. Penerima Manfaat

b. Pejabat Penerima Hasil Pengadaan

c. Panitia Penerima Hasil Pengadaan

d. PA/KPA

Jawaban :
PjPHP/PPHP Perpres 54/2010 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
PjPHP/PPHP Perpres 16/2018 : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Dua Hal Berbeda

Perpres 12/2021
Tidak ada PjPHP/PPHP

Pasal 57 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021
:
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima
barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang
diserahkan.
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021

1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 kepada PA/KPA.
(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.

Jawaban : d. PA/KPA

78. Berikut ini termasuk pihak-pihak yang merupakan Pelaku Penelitian, Kecuali :

a. PA/KPA K/L/PD sebagai Penyelenggara Penelitian

b. Perguruan Tinggi

c. Kelompok Masyarakat

d. Organisasi Masyarakat

Jawab :
Pihak yang termasuk dalam Pelaku Penelitian adalah :

Pasal 62
(1) Penelitian dilakukan oleh:
a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai **penyelenggara penelitian**;dan
b. pelaksana penelitian

Pelaksana Penelitian Pasal 62 ayat (3) :

a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

c. Perguruan Tinggi;

d. Ormas;dan/atau

e. Badan Usaha.

Jawab :

Kecuali adalah c. Kelompok Masyarakat

79. Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui....

A. Sayembara jasa konsultansi
B. Seleksi proposal penelitian
C. Kontes jasa lainnya
D. Presentasi proyek pekerjaan

Pasal 62 ayat 4

Jawaban : B. Seleksi proposal penelitian

80. Badan Usaha Asing yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam hal....

A Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang

B Pelaksanaan purnajual dan pembuatan suku cadang

C Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak

D Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak

Pasal 63 ayat 4

Jawab : B Pelaksanaan purnajual dan pembuatan suku cadang

81. Pada sebuah Instansi Pemerintah, belum terdapat PPK dan tidak ada personil yang dapat ditetapkan sebagai PPK pada PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa yang dapat melaksanakan tugas berkolaborasi dengan PA/KPA pada skenario berikut (pilih jawaban yang benar) :

a. PPTK dapat bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak, kemudian PA/KPA bertindak sebagai PPK untuk menetapkan rancangan kontrak.

b. KPA dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan tugas Pejabat Penandatangan Kontrak selama didelegasikan oleh PA, kemudian PPTK bertindak melaksanakan tugas PPK untuk menetapkan rancangan kontrak.

c. PA/KPA dapat bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak, kemudian PPTK bertindak melaksanakan tugas PPK untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

d. PA/KPA dapat bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak, kemudian PPTK bertindak melaksanakan tugas PPK untuk menetapkan Tim Pendukung.

Jawab :

b. KPA dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan tugas Pejabat Penandatangan Kontrak selama didelegasikan oleh PA, kemudian PPTK bertindak melaksanakan tugas PPK untuk menetapkan rancangan kontrak.

82. Pada Proses E-Purchasing, Penyedia Katalog Perusahaan XYZ setelah dilakukan negosiasi tidak mau menurunkan harga katalog, PPK melakukan pemilihan penyedia dengan tidak menindaklanjuti proses e-purchasing dengan perusahaan XYZ, kemudian PPK melakukan e-purchasing dengan perusahaan DEF, kemudian Perusahaan DEF menjadi penyedia pada surat pesanan dan setelah proses Surat Pesanan ditandatangani, ternyata proses pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan oleh Perusahaan DEF, sanksi yang diberikan adalah :

a. Penyedia XYZ dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan;

b. Penyedia DEF dan Penyedia XYZ dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun

c. Penyedia DEF dikenakan sanksi denda 1 permil untuk tiap keterlambatan perhari dan sanksi penghentian sementara dalam sistem e-purchasing selama 6 bulan

d. Penyedia DEF sanksi penghentian sementara dalam sistem e-purchasing selama 6 bulan

Jawaban yang tepat :
d. Penyedia DEF sanksi penghentian sementara dalam sistem e-purchasing selama 6 bulan

Lihat pasal 80

83. Universitas Negeri X memerlukan 100 unit komputer bermerek tertentu dengan sistem operasi yang dibutuhkan khusus hanya tersedia pada merek tersebut, sehingga dapat dilakukan penyebutan merek tersebut pada komputer yang khusus untuk satu merek komputer saja yang ada di pasaran, komputer tersebut dibutuhkan untuk menjadi komputer console dari sistem informasi pada Universitas Negeri X, komputer tersebut setelah dilakukan analisis pasar masih dapat dijual oleh banyak penyedia, metode pemilihan yang tepat adalah, KECUALI :

a. tender cepat

b. tender

c. e-Purchasing

d. Penunjukan Langsung

Jawaban :
d. Penunjukan Langsung

Perhatikan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (5)

84. Pada sebuah Pemda X di Perangkat Daerah L, pada Maret 2024 Perangkat Daerah tersebut terdapat 1 orang personil yang bertugas sebagai PPTK dan PPTK tersebut memiliki / bersertifikat PBJ Tingkat Dasar, selain PPTK tersebut tidak ada personil dalam Perangkat Daerah L yang memiliki sertifikat keahlian PBJ dasar maupun sertifikat kompetensi PBJ, dalam hal melaksanakan E-Purchasing dengan nilai Rp325juta rupiah, maka :

a. KPA menetapkan PPTK tersebut sebagai PPTK yang melaksanakan tugas PPK untuk melaksanakan E-Purchasing.
b. PA menetapkan PPTK tersebut sebagai PPTK yang melaksanakan tugas PPK untuk melaksanakan E-Purchasing.
c. PA/KPA dalam hal melakukan perikatan bertindak sebagai PPK.
d. PA/KPA menetapkan Pejabat Pengadaan yang merangkap sebagai PPTK.

Jawab :

c. PA/KPA dalam hal melakukan perikatan bertindak sebagai PPK.

Referensi :

Pasal 11 ayat (3)
Pasal 11 ayat (4)
Pasal 11 ayat (1) huruf h

Pasal 10 ayat (5)

Pasal 9 ayat (3)

Pasal 88

PerLKPP 7/2020 SDM PBJ

85. PT. AHLI ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan dan telah menerima SPPBJ dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pada pekerjaan Jasa Konsultansi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak bersama PPK, selanjutnya PT. AHLI mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Penyedia tersebut dikenakan Sanksi :

a. Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK dan Sanksi Pencairan Jaminan Pelaksanaan

b. Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas Usulan PPK

c. Sanksi Daftar Hitam oleh PPK atas usulan Kelompok Kerja Pemilihan dan Sanksi Pencairan Jaminan Pelaksanan

d. Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas Usulan Pokja Pemilihan

Jawaban :
b

86. Biro Hukum Provinsi X merencanakan untuk melaksanakan pengadaan konsultan hukum/advokasi untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada pihak-pihak dalam lingkungan Pemerintah Provinsi X secara keseluruhan, mana diantara berikut ini yang merupakan skenario yang paling efektif dan efisien.

a. Melaksanakan Pengadaan Langsung dengan Kontrak Waktu Penugasan

b. Melaksanakan Seleksi dengan Kontrak Lumsum

c. Melaksanakan Seleksi dengan Kontrak Waktu Penugasan

d. Melaksanakan Penunjukan Langsung dengan Kontrak Payung

Jawaban :

D

87. Dalam sebuah dokumen perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PA Dinas Pariwisata terdapat beberapa paket pekerjaan antara lain :

1) Satu paket pekerjaan konstruksi pembangunan fasilitas pelatihan, ruang audio visual, dan lapangan parkir dalam suatu lokasi yang sama dengan total Rp12,4Miliar yang ditujukan untuk usaha kecil.

2) Satu Paket pengadaan peralatan kesenian senilai Rp 800juta untuk usaha kecil.

3) Satu paket pemeliharaan gedung kesenian dengan nilai Rp850juta untuk usaha kecil.

Dalam pemaketan tersebut terdapat beberapa alternatif seperti di bawah ini. Manakah yang paling tepat?

a. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan dipecah menjadi tiga paket, kemudian paket peralatan kesenian di desain terbuka untuk usaha non-kecil.
b. Paket pekerjaan konstruksi pembangunan dan konstruksi pemeliharaan dipecah menjadi empat paket, paket alat kesenian hanya untuk usaha kecil.
c. Rencana di atas telah benar kecuali untuk paket peralatan kesenian yang mengingat pekerjaannya mestinya harus dapat juga diikuti oleh usaha bukan kecil.
d. Rencana paket-paket yang disusun PA sudah benar karena terdiri dari tiga paket yang telah disusun dengan orientasi pemaketan yang tepat.

Jawab :

D

88. Satuan Kerja APBN X membangun sebuah laboratorium dengan kontrak melalui penyedia senilai Rp13Milyar. Hingga progress 50% Penyedia bekerja sesuai jadwal, namun pada saat pekerjaan mencapai prestasi 70% maka pekerjaan tersebut mengalami kendala keuangan internal penyedia, penyedia mengajukan permohonan perubahan kontrak dalam hal termin pembayaran, termin pembayaran yang semula :

dibayarkan 70% pembayaran dari nilai kontrak setelah dikurangi uang muka (jika diberikan) setelah tercapai prestasi 80%,

diubah menjadi :

dibayarkan 70% pembayaran dari nilai kontrak setelah dikurangi uang muka (jika diberikan) setelah tercapai prestasi 70%.

Penyedia berharap dengan adendum / perubahan tersebut maka Penyedia memperoleh arus kas sehingga dapat melanjutkan kontrak sesuai jadwal.

Sikap PPK :

a. Mengabulkan permohonan tersebut karena tidak dilarang dalam ketentuan perubahan kontrak;
b. Menolak mengabulkan permohonan tersebut karena berakibat penambahan nilai kontrak akhir sebesar 10%.
c. Mengabulkan permohonan tersebut karena telah sesuai dengan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan penyedia selaku pelaku pengadaan.
d. Menolak mengabulkan permohonan tersebut karena melanggar tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan;

Jawab d

89. Pemda Provinsi X akan melaksanakan pengadaan melalui cara Swakelola dengan Universitas Y, KPA Universitas Y selaku pimpinan Universitas menyetujui, dalam kegiatan Swakelola tersebut, pilihlah opsi yang paling tepat berikut ini :

a. Gubernur Provinsi X melakukan penandatangan Kesepakatan Kerjasama dengan KPA Universitas Y.

b. Pejabat Pembuat Komitmen Pemda X melakukan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dengan KPA Universitas Y, kemudian PPTK Pemda X melakukan Kontrak

c. PA/KPA Penanggungjawab Anggaran Pemda X menandatangani Kesepakatan Kerjasama dengan Pimpinan Universitas Y, dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak antara PPK Pemda X dan Tim Pelaksana Universitas Y

d. Jawaban a, b, dan c benar

Kerjasama dalam Swakelola adalah sebagai berikut :

Pemprov X <----------> Univ Y.

Gubernur

Presiden

Menteri (PA)

Pimpinan Univ Y (KPA)

jawaban a tidak tepat

yang tepat :

Pemprov X <----------> Univ Y.

Gubernur Presiden

Kepala PD (PA) TTD Menteri (PA)

mou Pimpinan Univ Y (KPA)

MoU :

PPK ttd kontrak Pimpinan Tim

Pelaksana

Jawaban yang tepat C

90. Kementerian A akan melaksanakan pengadaan dengan cara swakelola tipe III dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTS yang akan ditunjuk sebanyak 5 PTS, sementara jumlah PTS yang mendaftar sebanyak 35 PTS. Bagaimana caranya PPK melakukan negosiasi harga/biaya kontrak swakelola jika kegiatan yang sama tadi dikerjakan oleh 5 PTS?

Pilih salah satu:

a. PPK akan menggunakan standar harga yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebagai harga satuannya

b. PPK dapat langsung melakukan tanda tangan kontrak dengan 5 PTS

c. PPK menggunakan tawaran proposal harga terendah untuk 5 PTS pada kegiatan yang sama tersebut

d. PPK melakukan negosisasi dan kesepakatan dengan harga/biaya kontrak yang sama dengan 5 PTS

Jawaban : D

PerLKPP 3/2021 lampiran Halaman 21